



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
KELAS 1A

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023



Jl. Veteran No. 273 Surakarta



pasurakarta@gmail.com

www.pa-surakarta.go.id



Pengadilan Agama Surakarta



(0271) 636270



@pasurakarta

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan suatu kewajiban bagi instansi pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut pada Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Perjanjian Kinerja / Perjanjian Kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II PERJANJIAN KINERJA	4
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	4
B. Dasar Hukum	5
C. Hakekat Perjanjian Kinerja	5
D. Isi Perjanjian Kinerja	6
E. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	6
BAB III PENUTUP	10
LAMPIRAN Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tahun 2023	

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik. Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil.

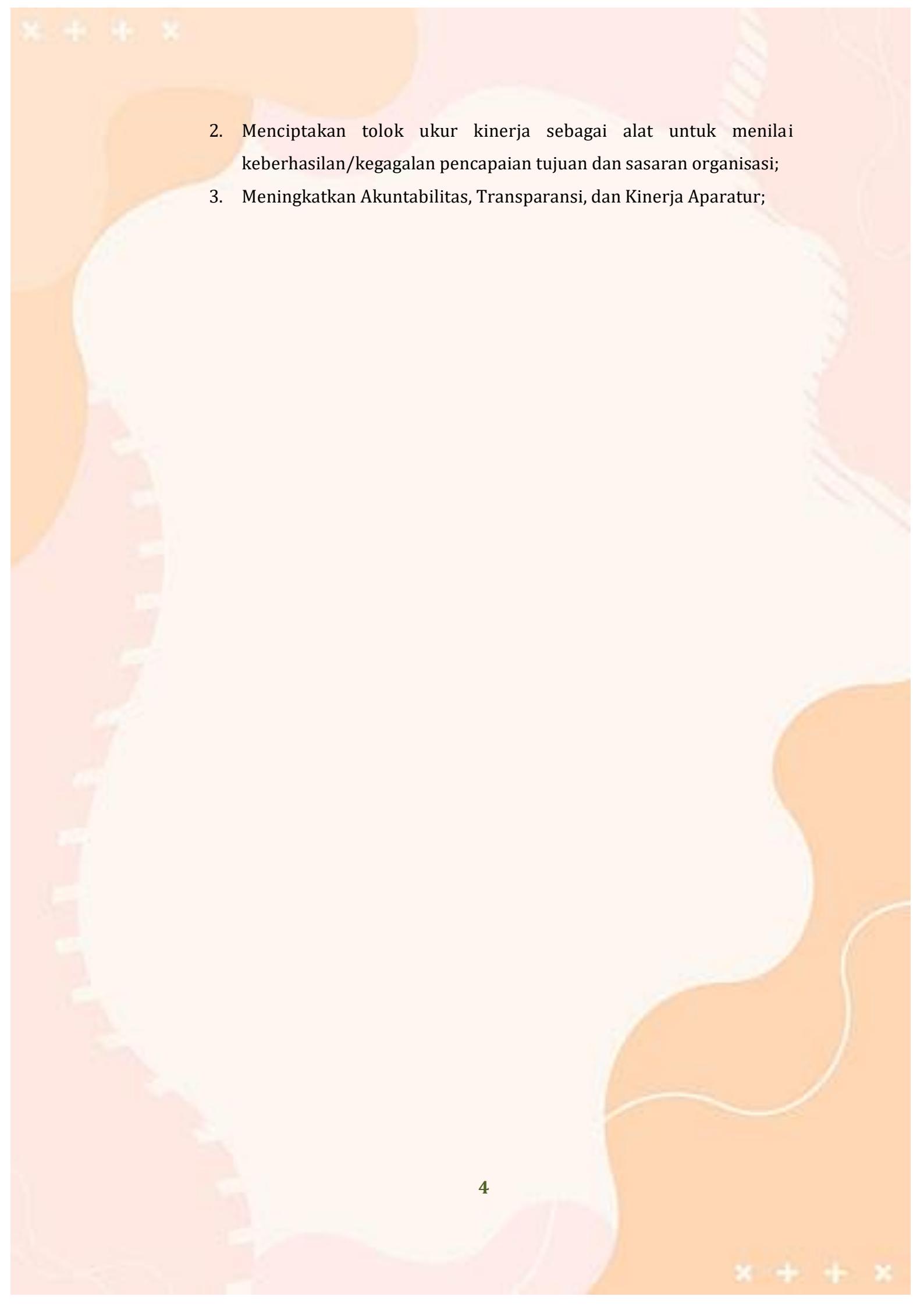
Selain itu masih banyaknya instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki system pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumberdaya yang dialokasikan

B. Maksud Dan Tujuan

Perjanjian Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;

- 
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - 3. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A Tahun 2023, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Perjanjian Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan

integrasi system akuntabilitas kinerja dengan system penganggaran. Perjanjian Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Perjanjian kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Dasar Hukum

Yang mendasari Perjanjian Kinerja Tahunan adalah Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi; dan Surat Edaran Menteri Negara PAN nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Perjanjian Kinerja;

C. Hakekat Perjanjian Kinerja

Hakekat dari Perjanjian kinerja bagi satuan kerja adalah:

1. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
2. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

3. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengembang tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).
4. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.
5. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

D. Isi Perjanjian Kinerja

Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;
2. Lampiran yang berisi:
 - a) Program-Program Utama;
 - b) Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
 - c) Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja Output dan atau Outcome; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator; dan Anggaran untuk setiap Program Utama.

E. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Adapun pernyataan perjanjian kinerja tahun 2023 kami sajikan pada halaman berikutnya :

PENYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nur Lailah Ahmad, S.H**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 30 Januari 2023



Pihak Kedua,

Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
NIP. 19570525 198403 1 003



Pihak Pertama,

Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,8
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%

Anggaran Tahun 2023 :

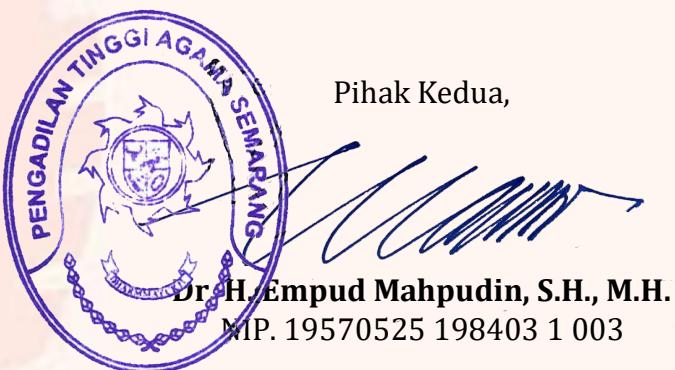
Dipa 01 : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

1. [51] Belanja Pegawai	Rp.	9.697.035.000
2. [52] Belanja Barang	Rp.	1.242.049.000
3. [53] Belanja Modal	Rp.	0
Total	Rp.	9.701.707.000

Dipa 04 : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

1. Prodeo	Rp.	7.000.000
2. Posbakum	Rp.	35.460.000
Total	Rp.	42.460.000

Surakarta, 30 Januari 2023



Pihak Kedua,

Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
NIP. 19570525 198403 1 003



Pihak Pertama,

Nur Lailah Ahmad, S.H
NIP. 19690313 199403 2 004

BAB III

PENUTUP

Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A. Penyusunan Perjanjian kinerja ini diawali dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A menyusun Perjanjian kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan. Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Surakarta ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A, dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Nur Lailah Ahmad, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama



Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.
NIP. 19741012 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,8
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%



Pihak Kedua

Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.
NIP. 19741012 200502 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Nur Lailah Ahmad, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004

Surakarta, 2 Januari 2023
Pihak Pertama

H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 19640727 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Pengadilan Agama Surakarta Kelas 1A

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,8
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%



Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 19640727 199403 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sambudi, S.Ag., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Surakarta
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Nur Lailah Ahmad, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

Sambudi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750322 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

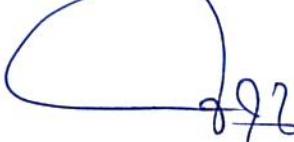
Unit Kerja : Pengadilan Agama Surakarta

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Program Kerja Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang	1. Terwujudnya Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 04 2. Terwujudnya Perpanjangan Kontrak Perjanjian dengan Tenaga Kontrak 3. Terwujudnya Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan 04	100%
2.	Terwujudnya Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1. Terwujudnya SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2. Terwujudnya Penyusunan SAKIP 3. Terwujudnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 4. Terwujudnya Dokumen Rencana Kegiatan 5. Terwujudnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 6. Terwujudnya pelaksanaan revisi anggaran jika diperlukan	100%
3.	Terwujudnya Penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT dan LKjIP)	1. Terwujudnya SOP Penyusunan SAKIP 2. Terwujudnya Penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT dan LKjIP) 3. Terwujudnya pengelolaan data kinerja 4. Terwujudnya review SAKIP jika diperlukan 5. Terwujudnya evaluasi SAKIP dan tindak lanjutnya 6. Terwujudnya pengukuran kinerja secara periodik	100%

4.	Terwujudnya Pengawasan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi pada Bagian Kesekretariatan	1. Terwujudnya kinerja yang produktif sesuai dengan tupoksi pada bagian kesekretariatan	100%
		2. Terwujudnya pengawasan terhadap absensi meliputi ketidakhadiran, keterlambatan dan kepulangannya	100%
		3. Terwujudnya inventarisasi dan rekomendasi data pegawai Pengadilan Agama Surakarta	100%
		4. Terwujudnya konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan	100%
		5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan	100%
		6. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan	100%

Pihak Kedua

 Nur Lailah Ahmad, S.H.
 NIP. 19690313 199403 2 004

Surakarta, 2 Januari 2023
Pihak Pertama


Sambudi, S.Ag., M.Si.
 NIP. 19750322 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Subagyo Haryanto, S.H.
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

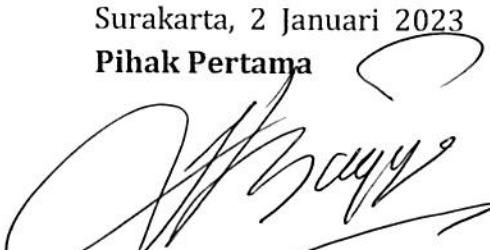
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 19640727 199403 1 003

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama


H. Subagyo Haryanto, S.H.
NIP. 19640510 198503 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Pengadilan Agama Surakarta

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Melaksanakan Tugas-tugas yang berkaitan dengan Meja Informasi	Persentase Informasi dan Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
2.	Melakukan Pemberkasan Perkara	Persentase Berkas Perkara yang selesai diminutasi	100%
3.	Menerima, Memeriksa, Mengolah dan Menyajikan Laporan Data Perkara	Persentase Laporan Data Perkara yang diselesaikan	100%
4.	Mengolah dan Menyusun Data Statistik Perkara	Persentase Laporan Data Statistik Perkara yang selesai disusun	100%
5.	Mengolah Arsip Perkara	Persentase Berkas Perkara yang diarsipkan dengan baik	100%
6.	Menyerahkan Akta Cerai dan Salinan Putusan kepada pihak yang berkepentingan	Persentase Akta Cerai dan Salinan Putusan yang diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.	100%



Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

H. Subagyo Haryanto, S.H
NIP. 19640510 198503 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Basyroh, S.Ag.

Jabatan : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surakarta
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : H. Edy Iskandar, S.H., M.H.

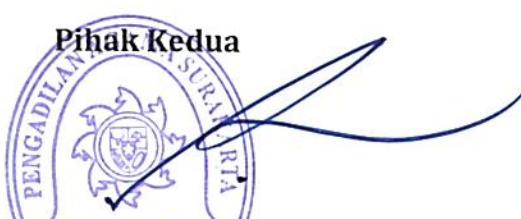
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Surakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 19640727 199403 1 003

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama



Umi Basyroh, S.Ag.
NIP. 19710210 199203 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Pengadilan Agama Surakarta

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menerima Berkas Perkara Gugatan	Persentase Perkara Gugatan yang diselesaikan	100%
2.	Mengisi Buku Register Perkara Gugatan	Persentase Perkara Gugatan yang dicatat dalam Buku Register	100%
3.	Menyusun dan Mengolah Data Perkara Gugatan	Persentase Data Perkara Gugatan yang diselesaikan	100%
4.	Menyusun Kelengkapan Berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK berupa Bundel B	Persentase Berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK yang disusun lengkap	100%
5.	Mengelola Arsip Perkara Gugatan yang masih Aktif	Persentase Berkas Perkara Gugatan yang selesai diminutasi	100%
6.	Menerima Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Gugatan dari Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	Persentase Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Gugatan yang diterima dari Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	100%
7.	Mengawasi Berkas Perkara Gugatan yang Berkekuatan Hukum Tetap	Persentase Pengawasan terhadap Berkas Perkara Gugatan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap	100%
8.	Menyerahkan Berkas Perkara Gugatan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Muda Hukum	Persentase Berkas Perkara Gugatan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang telah diserahkan kepada Panitera Muda Hukum	100%



Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama



Umi Basyiroh, S.Ag.
NIP. 19710210 199203 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Siti Alimah, S.Ag.

Jabatan : Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surakarta
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : H. Edy Iskandar, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Surakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MF".

Pihak Kedua

H. Edy Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 19640727 199403 1 003

Hj. Siti Alimah, S.Ag.
NIP. 19690610 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Pengadilan Agama Surakarta

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menerima Perkara Permohonan	Persentase Perkara Permohonan	100%
2.	Mengelola Arsip Perkara Permohonan yang Masih Aktif	Persentase Pengelolaan Arsip Perkara Permohonan yang Masih Aktif	100%
3.	Mengisi Buku Register Perkara Permohonan	Persentas Pengisian Buku Register Perkara Permohonan	100%
4.	Menerima Buku Register Perkara Permohonan	Persentase Penerimaan Buku Register Perkara Permohonan	100%
5.	Mengolah dan Menyusun Data Perkara Permohonan	Persentase Pengolahan dan Penyusunan Data Perkara Permohonan	100%
6.	Menyusun Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi dan PK berupa Bundel B	Persentase Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi dan PK berupa Bundel B	100%

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama



Hj. Siti Alimah, S.Ag.
NIP. 19690610 199703 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anis Fuuadah, S.H.

Jabatan : Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Surakarta
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Sambudi, S.Ag., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Surakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Sambudi, S.Ag., M.Si..
NIP. 19750322 199803 1 003

Surakarta, 3 Januari 2023

Pihak Pertama

Anis Fuuadah, S.H.
NIP. 19791226 200604 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Pengadilan Agama Surakarta

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Manajemen dan Pelaporan Barang Milik Negara	1. Terwujudnya SOP Penatausahaan Aset 2. Terwujudnya Manajemen dan Pelaporan Barang Milik Negara 3. Terwujudnya SOP Manajemen Persediaan 4. Terwujudnya Manajemen dan Pelaporan Persediaan 5. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan Persediaan	100% 100% 100% 100% 100%
2.	Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	1. Terwujudnya SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan 2. Terwujudnya Manajemen Lingkungan dan Keamanan 3. Terwujudnya Kelengkapan Sarana Lingkungan dan Keamanan 4. Terwujudnya Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan	100% 100% 100% 100%
3.	Pengelolaan Perpustakaan	1. Terwujudnya SOP Pengelolaan Perpustakaan 2. Terwujudnya Manajemen Perpustakaan 3. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan	100% 100% 100%
4.	Pelaksanaan Anggaran	1. Terwujudnya SOP Pencairan dan Pertanggung jawaban Anggaran 2. Terwujudnya Pengelolaan Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Terwujudnya Transparansi Pengelolaan dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran	100% 100% 100%
5.	Pengelolaan PNBP	1. Terwujudnya SOP Penatausahaan PNBP 2. Terwujudnya Pengelolaan dan Pelaporan PNBP yang akuntabel	100% 100%
6.	Penyusunan Laporan Keuangan	1. Terwujudnya SOP Penyusunan Laporan Keuangan 2. Penyusunan Laporan Keuangan yang valid dan akuntabel	100% 100%

7.	Pengelolaan Saran Prasarana Kantor	1. Pengelolaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100%
----	------------------------------------	--	-------------



Sambudi, S.Ag., M.Si..
NIP. 19750322 199803 1 003

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

Anis Fuuadah, S.H.
NIP. 19791226 200604 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Rulianti, S.Kom., M.Eng.

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Surakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Sambudi, S.Ag., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Surakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Sambudi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750322 199803 1 003

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

Diana Rulianti, S.Kom., M.Eng.

NIP. 19810304 200604 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Pengadilan Agama Surakarta

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	1. Terwujudnya SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2. Terwujudnya Dokumen Renstra 3. Terwujudnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 4. Terwujudnya Dokumen Rencana Kegiatan 5. Terwujudnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 6. Terwujudnya pelaksanaan revisi anggaran jika diperlukan	100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.	Penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT dan LKjIP)	1. Terwujudnya SOP Penyusunan SAKIP 2. Terwujudnya penyusunan SAKIP (IKU, Renstra, RKT, PKT dan LKjIP) 3. Terwujudnya pengelolaan data kerja 4. Terwujudnya review SAKIP jika diperlukan 5. Terwujudnya evaluasi SAKIP dan tindak lanjutnya 6. Terwujudnya pengukuran kinerja secara periodik	100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.	Penyusunan Laporan	1. Terwujudnya SOP Penyusunan Laporan 2. Terwujudnya Laporan E Monev yang update dan secara periodik 3. Terwujudnya Laporan Tahunan yang terpublikasi di website	100% 100% 100%
4.	Pengelolaan Teknologi Informasi	1. Terwujudnya SOP Pengelolaan TI dan Inovasi 2. Terwujudnya Rencana Pengembangan TI dalam pemberian layanan 3. Terwujudnya Inovasi Pelayanan Publik 4. Terwujudnya Penerapan TI dalam pemberian pelayanan publik 5. Terwujudnya kelengkapan conten dan updating website	100% 100% 100% 100% 100%

		6. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan e-governement dibagian kesekretariatan dan kepaniteraan	100%
--	--	---	-------------



Sambudi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750322 199803 1 003

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

Diana Rulianti, S.Kom., M.Eng.
NIP. 19810304 200604 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Permana, S.Kom

Jabatan : Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Surakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : Sambudi, S.Ag., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Surakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Sambudi, S.Ag., M.
NIP. 19750322 1

Sambudi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750322 199803 1 003

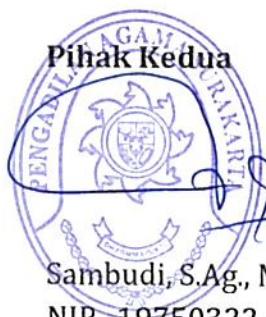
Indra Permana, S.Kom

NIP 19861106 200912 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Unit Kerja : Pengadilan Agama Surakarta

		10. Terwujudnya Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai	100%
		11. Terwujudnya SOP Kenaikan Gaji Berkala	100%
		12. Terwujudnya Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala	100%
		13. Terwujudnya Pengusulan Promosi dan Mutasi Pegawai	100%
		14. Terwujudnya SOP Pengelolaan Izin Perkawinan dan Perceraian	100%
		15. Terwujudnya SOP Pengelolaan Pensiun	100%
		16. Terwujudnya Pengelolaan Pensiun	100%
5.	Pengelolaan Pegawai	1. Terwujudnya SOP Pemberian Nilai Pegawai dan Pendeklegasian Wewenang	100%
		2. Terwujudnya Penilaian Pegawai dan Pengukuran Kinerja melalui SKP	100%
		3. Terwujudnya Pendeklegasian Wewenang melalui Penunjukan PLT atau PLH	100%
6.	Penghargaan Kepada Pegawai	1. Terwujudnya SOP Pemberian Penghargaan kepada Pegawai	100%
		2. Terwujudnya Pengusulan Pemberian Penghargaan Pegawai	100%
7.	Pelaporan LHKPN - LHKSN	1. Terwujudnya SOP Pelaporan LHKPN – LHKSN	100%
		2. Terwujudnya pembaharuan dan pelaporan LHKPN - LHKSN	100%


Pihak Kedua
Sambudi, S.Ag., M.Si..
NIP. 19750322 199803 1 003

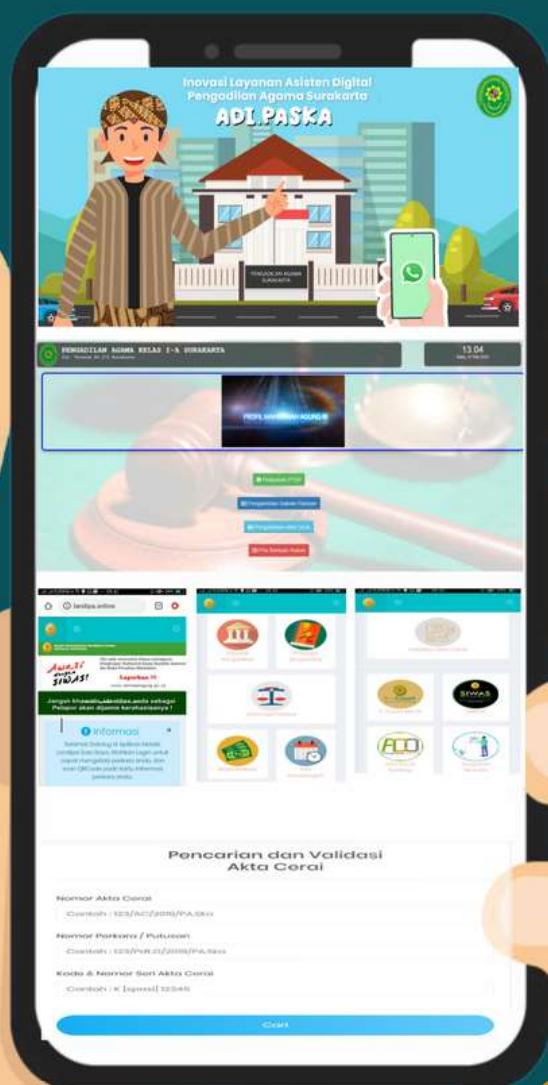
Surakarta, 2 Januari 2023
Pihak Pertama


Indra Permana, S.Kom.
NIP. 19861106 200912 1 005



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
KELAS 1A

"PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DALAM GENGGAMAN"



Jl. Veteran No. 273 Surakarta



pasurakarta@gmail.com



www.pa-surakarta.go.id



Pengadilan Agama Surakarta



(0271) 636270



@pasurakarta